

PETA MUTU MADRASAH ALIYAH DI INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2013

M. Amin Thaib BR

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning, No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur

email: maminthaib@yahoo.com

Naskah diterima Tanggal 3 Maret 2014. Revisi 7 Maret – 20 April 2014. Disetujui 27 April 2014

ABSTRAK

Untuk meningkatkan mutu madrasah tentu saja dibutuhkan peta mutu madrasah tersebut. Artikel ini berupaya memetakan mutu MA dari hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional hingga akhir Oktober 2013 terhadap MA di Indonesia Bagian Barat (IBB) berdasarkan pada tiga karakteristik MA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian menemukan; (1) Jumlah MA di IBB 3.101 hampir separuh (46.53 %) dari jumlah MA se Indonesia (6.664) yang telah memenuhi 63% bahkan 44% nya pada peringkat A & B. sudah hampir memenuhi sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014; (2) MA Negeri 383 lebih dari separuh MAN se Indonesia, 79% sudah memenuhi standar bahkan 73%nya sudah pada peringkat A & B yang sudah melampaui sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014. Sementara MA Swasta sebanyak 2.718 hampir setengah dari MAS se Indonesia, baru 60%nya yang sudah memenuhi standar dan baru 40% pada peringkat A & B; (3) MA di IBB tersebar di 13 Provinsi, baru di 5 Provinsi (Jabar, Sumut, DKI Jakarta, Kep. Riau dan Babel) yang sudah memenuhi target sasaran pembangunan. (5) Problematika mendasar yang dihadapi MA adalah keberadaan bermacam laboratorium, sehingga dalam rangka visitasi Team Asesor pihak MA banyak melakukan rekayasa yang tidak perlu.

Kata Kunci: Mutu, madrasah, akreditasi, Indonesia Bagian Barat.

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat. Kini madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam di dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Lembaga pendidikan madrasah ini telah tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, dalam kurun waktu kurang lebih satu abad, membuktikan bahwa madrasah telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak peserta didik. Karakter itulah

yang membedakan madrasah dengan sekolah umum. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989, madrasah didefinisikan sebagai "sekolah umum dengan ciri khas Islam."

Pengakuan tersebut tidak diiringi dengan pembenahan semua problematika yang mengitarinya, terutama keterbatasan sarana prasarananya, seperti pengadaan tanah dan bangunan ruangan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sejak pengakuan tersebut, Kementerian Agama belum pernah mengadakan lahan untuk madrasah sekalipun madrasah negeri, selalu mengandalkan partisipasi atau hibah dari masyarakat, akibatnya letak dan luasnya banyak yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sampai sekarang banyak madrasah negeri yang status tanahnya bermasalah; belum ada sertifikat. Terlebih lagi yang dialami Madrasah Aliyah Swasta, jangankan untuk menyediakan ruang laboratorium fisika, kimia dan biologi, untuk menyediakan ruang guru, kepala madrasah, dan TU serta Perpustakaan saja umumnya menyatu dalam satu ruangan yang hanya disekat dengan lemari. Begitu juga dengan problem keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga Pendidik dan Kependidikannya, sekalipun setiap tahunnya ada pengangkatan tenaga baru, pelatihan dan pendidikan tenaga yang ada, namun tidak menjangkau kebutuhan.

Memperhatikan luasnya problematika pendidikan Madrasah Aliyah (MA) dan terbatasnya jangkauan dan biaya pelayanan Kementerian Agama, maka strategi peningkatan mutu MA menetapkan MA Negeri sebagai MA percontohan bagi MA Swasta. Sehingga semua MA Negeri dianggap sudah memenuhi standar dan yang perlu diakreditasi hanya MA Swasta. Namun, dalam realitasnya tidak semua MA Negeri pantas dijadikan percontohan terutama dari segi sarana prasarana serta tenaga Pendidik dan Kependidikannya. Maka pada tahun 1993 ditempuh strategi Model, dimana setiap Propinsi dipilih satu atau lebih MA yang memiliki sarana prasarana, tenaga Pendidik dan kependidikan serta siswa yang memadai dibina secara khusus untuk dijadikan percontohan dan *magnet school* kepada madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Madrasah Model ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat belajar bersama dalam pengembangan dan inovasi bagi madrasah-madrasah di sekitarnya.

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara

bertahap, terencana, dan terukur pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan(UUSPN No 20 tahun 2013, Bab XVI). Melalui Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2005menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal baik negeri maupun swasta yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah No 19 Ta 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat 2.

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sejak tahun 2009 telah menggunakan kriteria dan perangkat akreditasi, yang mengacu pada delapan komponen Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SMA/MA (Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008). Telah disusun juga Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2009.

Pada tahun 2010 dan 2011 Balai Litbang Agama Jakarta telah melakukan penelitian tentang kesiapan MA untuk diakreditasi di Propinsi Banten dan Riau yang hasilnya antara lain MA mengalami kesulitan dari aspek pembiayaan untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam akreditasi, karena semua dokumen perlu disiapkan dengan melibatkan semua tenaga Pendidik dan kependidikan madrasah yang bersangkutan. Untuk itu, penelitian merekomendasikan kepada unit operasional agar mengalokasikan dana secara khusus untuk masing-masing madrasah yang akan diakreditasi.

Pada tahun 2013, Balai Litbang Agama Jakarta memandang perlu mengadakan penelitian lanjutan untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Pembangunan Kementerian Agama 2010-2014 dalam bidang pendidikan agama di antaranya adalah “Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan” (Renstra Kementerian Agama 2010-2014, BAB II, D, 3,h). Sasaran tersebut dikongkritkan dalam Renstra Ditjen Pendis dengan indikator capaian

“ semua MA telah diakreditasi oleh BAP dengan hasil 50% minimal pada peringkat B dan 70% memenuhi standar SNP (Renstra Pendis 2010-2014), sekaligus menginventarisasi problematika yang masih mengitarinya untuk dirumuskan kebijakan pemecahannya, khususnya di MA Indonesia Bagian Barat yang dipetakan berdasarkan tiga karakteristik dasar Madrasah Aliyah, mencakup status, wilayah dan program yang diselenggarakan.

Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang diteliti adalah,tingkat pencapaian sasaran pembangunan Standar Nasional Pendidikan MA di Indonesia Bagian Barat, dan Problematikanya berdasarkan karakteristik status, wilayah dan program yang diselenggarakannya, yang secara operasional dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Seberapa tinggi tingkat pencapaian standar nasional pendidikan MA Negeri dan Swasta di Indonesia Bagian Barat sampai Oktober 2013?
- 2) Seberapa tinggi tingkat pencapaian standar nasional pendidikan MA di 13 Propinsi Indonesia Bagian Barat sampai Oktober 2013?
- 3) Seberapa tinggi standar nasional pendidikan MA yang menyelenggarakan Program IPA, IPS, Bahasa dan Agama di IBB sampai Oktober 2013 ? dan
- 4) Apa problematika yang dialami MA dalam Akreditasi sampai Oktober 2013?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran pembangunan Standar Nasional Pendidikan MA di Indonesia Bagian Barat, dan problematikanya berdasarkan karakteristik status, wilayah dan program yang diselenggarakannya sampai Oktober 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan informasi tentang tingkat pencapaian sasaran pembangunan Standar Nasional Pendidikan MA di Indonesia Bagian Barat dan problematikanya berdasarkan karakteristik Status, Wilayah dan Program yang diselenggarakannya sampai Oktober 2013;

- 2) Memberikan masukan (*entry point*) bagi pemegang kebijakan dalam membuat kebijakan baru terkait upaya pelayanan peningkatan kualitas MA.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan agar dapat menggambarkan secara utuh kaitan antara komponen yang diteliti dalam meningkatkan kualitas hasil akreditasi MA. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan data berasal dari: Emis untuk data dasar Madrasah Aliyah yang diunduh melalui Web nya <http://emispendis.kemenag.go.id/>, dan Badan Akreditasi Nasional yang diunduh melalui websitenya <http://www.ban-sm.or.id/> untuk mengumpulkan data Peringkat Akreditasi masing-masing MA berdasarkan karakteritis Status dan Wilayahnya. Sementara data karakteritis Program yang diselenggarakan MA digali dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud berupa CD laporan hasil Ujian Nasional tahun 2013. Sementara data Problematika MA dalam proses akreditasi selama ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa kepala madrasah maupun guru yang dipilih secara acak di DKI Jakarta dan kota Tasikmalaya.

Analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap data kuantitatif yang terkumpul melalui studi dokumentasi dengan teknik penjumlahan, dan prosentase. Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui proporsi tiap-tiap variabel. Analisis kualitatif digunakan terhadap data kualitatif yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Denzin dkk 1994, 429) yaitu: (a) Reduksi data, yakni setelah data terkumpul melalui wawancara dan studi dokumentasi, direduksi sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi data yang dianggap tidak sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian; (b) Penyajian data dengan cara mengorganisasikan dan memaparkan data sedemikian rupa. Jika dianggap perlu, untuk data yang memiliki kompleksitas tinggi digunakan tabulasi distribusi frekuensi guna lebih mudah dibaca, dipahami, dan

diinterpretasikan; dan (c) Penggambaran dan pembuktian yang melibatkan peneliti dalam interpretasi terhadap data yang disajikan sehingga dapat dipahami maksudnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bertalian dengan tujuan penelitian.

Sasaran Penelitian ini mencakup semua Madrasah Aliyah yang berada di Indonesia Bagian Barat sebagai wilayah Kerja Balai Litbang Agama Jakarta, berdasarkan data EMIS tahun 2011/2012 sebanyak 3.161 Lembaga, terdiri atas 384 Negeri dan 2.777 Swasta; tersebar pada 13 Provinsi.

Tabel 1
Jumlah MA sasaran berdasarkan Status dan wilayah di Indonesia Bagian Barat

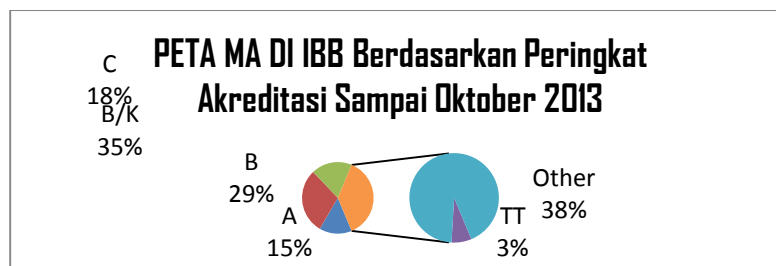
No	Provinsi	Status		
		Negeri	Swasta	Σ
1.	Aceh	68	134	202
2.	Sumatera Utara	41	391	432
3.	Sumatera Barat	47	137	184
4.	Riau	18	230	248
5.	Jambi	31	153	184
6.	Sumatera Selatan	21	170	191
7.	Bengkulu	14	31	45
8.	Lampung	17	232	249
9.	Kep. Bangka Belitung	4	18	22
10.	Kep. Riau	5	24	29
11.	DKI Jakarta	22	65	87
12.	Jawa Barat	77	897	974
13.	Banten	19	295	314
Σ		384	2,777	3,161

Sumber: <http://emispendis.kemenag.go.id/> diunduh tgl 6 Oktober 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PetaMutu MA IBB Berdasarkan Status dan Hasil Akreditasi(Oktobre 2013)

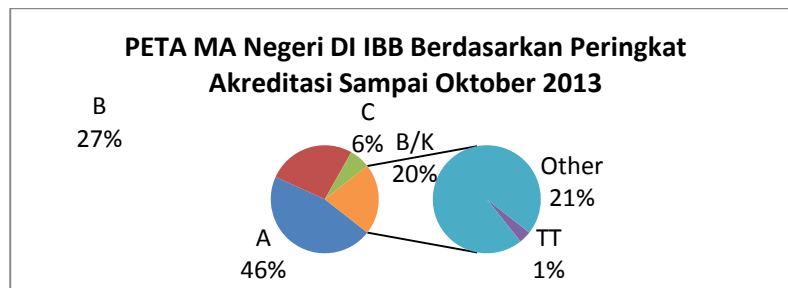
Gambar 1



Tabel 2**Klasifikasi Hasil Akreditasi**

Klasifikasi Hasil AKreditasi (BAN-S/M, Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah, Hal 82)		
Peringkat	Rentangan Nilai	Keterangan
A	≥ 86	Amat Baik
B	71 – 85	Baik
C	56 - 70	Cukup Baik
D	≤ 55	Tidak Terakreditasi

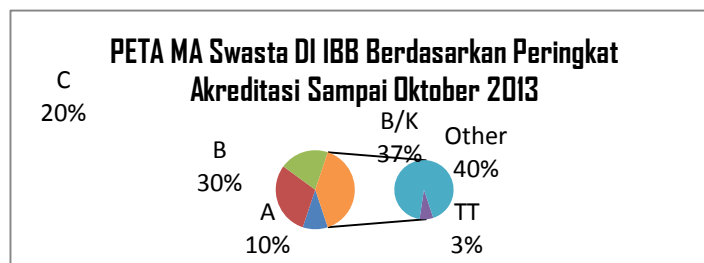
Jumlah MA di IBB yang merupakan wilayah Kerja Balai Litbang Agama Jakarta sebanyak 3.101 MA.(46.53% dari jumlah MA se-Indonesia yang menurut Emis 2011/2012 sebanyak 6.664. Di antaranya 1.914 (62%) madrasah sudah memenuhi standar Nasional Pendidikan, tinggal 249 (8%) MA lagi untuk mencapai target Kementerian Agama pada tahun 2014, serta kurang 187 (6%) MA lagi yang terakreditasi minimal pada peringkat B. Sasaran Kementerian Agama tersebut bisa dicapai pada tahun 2014 selama yang 1.076 (35 %) MA yang sudah Kadaluarsa atau yang belum trakreditasi didorong untuk mengakreditasikan diri.

Gambar 2

Lebih lanjut, dilihat dari statusnya untuk 383 MAN (50.53% dari 758MAN se Indonesia) justru sudah 79% (301) MA yang memenuhi standar yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan, bahkan kalau 78 MAN yang sedang dalam proses akreditasi selesai tahun depan semuanya akan lulus akreditasi. Sementara 3 MAN yang tidak lulus Akreditasi; (1) MAN Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh yang baru diakreditasi tahun kemaren (tanggal 13 November 2012) dengan nilai 57,54 yang lemah pada standar proses (43), sarana prasarana (45) dan pembiayaan (50)

bahkan 39 siswanya program IPA dan 40 siswa program IPS yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2013 ini semuanya lulus murni dengan nilai rata-rata 6.88 dan 7.03 dan setelah dikonversi 7.61 dan 7.64. Sehingga untuk memenuhi tiga standar yang masih lemah tidak begitu sulit jika didukung secara khusus oleh Kemenag Propinsi Aceh; (2) MAN Balai-balai Kampung Manggi Kota Padang Panjang diakreditasi pada 11 November 2008 dengan nilai 58.65, belum menggunakan instrumen yang dibakukan. Bila dikaitkan dengan prestasi 17 siswa program IPA dan 17 siswa Program IPS,serta 11 siswa program agamanya yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2013 ini yang masing-masing 11 siswa program IPA dan IPS serta 5 siswa program agamanya, walaupun baru bisa lulus setelah dikonversi dengan nilai ujian sekolahnya; dan (3) MAN PPGB Paingan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat yang tidak lulus akreditasi pada 12 November 2012. Bila dikaitkan dengan prestasi 16 siswa program IPA dan 15 siswa program IPS serta 15 siswa program Agama yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2013 ini, sekalipun 15 siswa program IPA, semua siswa program IPS dan 5 siswa program Agama baru lulus setelah dikonversi dengan nilai sekolahnya. Kedua MAN ini cukup potensial namun, perlu pelayanan khusus dari Kemenag Sumatera Barat untuk memenuhi tuntutan 8 standar nasional pendidikan dimana semua MAN didaerah lain sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan minimal.

Gambar 3



Jumlah MA Swasta yang berada di wilayah IBB dengan jumlah 2.718, sama dengan 46.02% dari 5.906 MAS Se Indonesia, baru 1.640 MAS (60%) yang memenuhi standar, yang berarti masih kurang 10 % (272) MA lagi untuk memenuhi sasaran

Kementerian Agama RI pada tahun depan, dan 166 MAS yang diakreditasi tahun 2008 segera mengakreditasikan diri karena sudah kadaluarsa pada tahun depan.

Jika dikaitkan dengan sasaran kedua Kementerian Agama dimana 50 % MA sudah terakreditasi minimal B pada tahun 2014, kondisi capaian pada tahun 2013 ini baru mencapai 40% (1.092), diantaranya ada 80 MAS yang tahun depan kadaluarsa, sehingga untuk mencapai sasaran kedua Kementerian Agama diatas masih perlu peningkatan 272 MAS yang belum terakreditasi, dan mendorong 80 MAS yang sudah teakreditasi minimal B tetapi tahun depan sudah kadaluarsa agar segera mengikuti akreditasi tahun depan.

Tabel 3

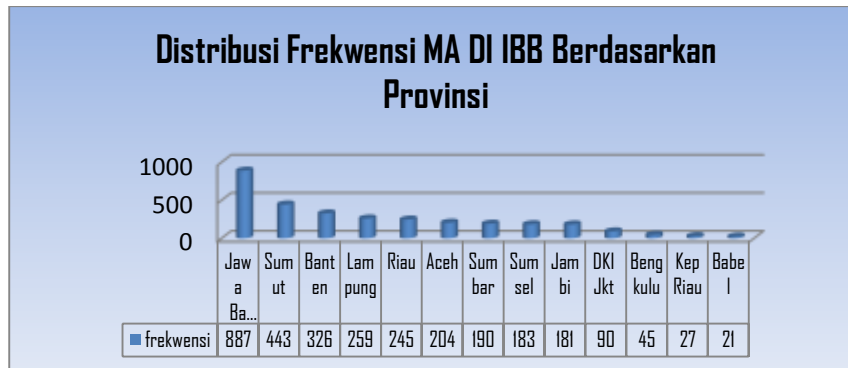
Jumlah MA di IBB yang diakreditasi tahun 2008 dan akan kadaluarsa pada tahun 2014
Berdasarkan Peringkat Akreditasi, status dan Wilayah

N0	Propinsi	Peringkat Akreditasi dan Status															
		A				B			C			TT			Σ		
		N	S	NS	N	S	NS	N	S	NS	N	S	NS	N	S	NS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jawa Barat	0	1	1	0	3	3	0	11	11	0	0	0	0	15	15	
3	Banten	0	0	0	1	10	11	0	5	5	0	2	2	1	17	18	
4	Lampung	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1	3	4	
5	Sumsel	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	Bengkulu	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	3	4	
7	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	3	3	
8	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	3	3	
9	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Riau	0	1	1	0	16	16	0	11	11	0	17	17	0	45	45	
11	Sumbar	1	1	2	3	4	7	3	5	8	1	7	8	8	17	25	
12	Sumut	0	0	0	1	7	8	0	2	2	0	1	1	1	10	11	
13	Aceh	0	3	3	0	23	23	0	11	11	0	12	12	0	49	49	
	IBB	2	6	8	6	66	72	3	51	54	1	43	42	12	166	178	

Sumber: Data olahan dari <http://www.ban-sm.or.id/> diunduh tgl 10 Oktober 2015

Peta MA IBB berdasarkan Wilayah dan Hasil Akreditasi (Oktober 2013)

Gambar 4



Penyebaran MA terpadat berada di Propinsi **Jawa Barat** 887 (28.6% dari 3.101 MA di IBB) yang telah memenuhi standar baru 448 (60.6%), sehingga untuk mencapai sasaran pembangunan tahun depan perlu mendorong minimal 88 MA yang belum diakreditasi, ditambah 15 MA yang kadaluarsa pada tahun depan untuk mengikuti akreditasi tahun depan. Sedangkan sasaran pembangunan kedua tahun depan sudah (57.9%) melampaui target sekalipun tahun depan ada 4 MA yang akan kadaluarsa.

Posisi terpadat kedua, Propinsi Sumatera Utara dengan 443 MA (14.3% dari 3.101 MA di IBB), dikaitkan dengan sasaran pembangunan kondisi sekarang sudah 84.8% (376 MA) melampaui target sekalipun tahun 2014 ada 10 MA yang kadaluarsa. Begitu juga dengan sasaran pembangunan yang kedua sekarang sudah 58.2% melampaui target sekalipun tahun depan ada 8 MA yang kadaluarsa.

Posisi terpadat ketiga adalah Propinsi Banten 326 MA (10.5% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70% (228 MA) sudah memenuhi standar, kondisi sekarang baru mencapai 56.7% (185 MA) sehingga perlu segera mendorong minimal 43 MA, disamping 16 MA yang akan kadaluarsa segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran kedua tahun depan dimana 50 % (163 MA) telah terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru 114 MA (34.9 %), sehingga tahun depan harus segera mendorong minimal 19 MA yang belum terakreditasi ditambah 11 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat keempat adalah Propinsi Lampung 259 MA (8.4% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 181 MA (70%) sudah memenuhi standar, kondisi sekarang baru 127 MA (49%) sehingga perlu mendorong minimal 54 MA dan 4 MA akan kadaluarsa untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua minimal 130(50%) MA terakreditasi peringkat B. Sekarang baru 17% (44 MA), sehingga harus mendorong minimal 86 MA yang belum terakreditasi dan 2 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat kelima adalah Propinsi Riau 245 MA (7.9% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70% (172 MA) sudah memenuhi standar, sekarang sudah 71% (174 MA) memenuhi target namun karena ada 28 MA(11.4%) akan kadaluarsa tahun depan, sehingga harus mendorong minimal 28 MA tersebut untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran kedua dimana 123 (50%) MA terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru mencapai 38.8% (95 MA), sehingga harus segera mendorong minimal 28 MA yang belum terakreditasi ditambah 17 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat keenam Propinsi Aceh 204 MA (6.6 % dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70% (143 MA) sudah memenuhi standar, sekarang baru 59.3 % (121 MA) sehingga harus mendorong minimal 22 MA yang belum terakreditasi dan 37 MA yang akan kadaluarsa untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50% (102 MA) telah terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru 40.7 % (83 MA), sehingga harus mendorong minimal 19 MA yang belum terakreditasi, dan 26 MA yang masa berlakunya akan berakhir tahun depan untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat ketujuh Propinsi Sumatera Barat 190 MA (6.1% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70 % (133 MA) sudah memenuhi standar, sekarang baru 52.6% (100 MA) sehingga perlu mendorong minimal 33 MA yang belum terakreditasi dan 17 MA yang akan kadaluarsa untuk

segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua dimana 50 % (95 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru 26.3 % (50 MA), sehingga harus segera mendorong minimal 45 MA yang belum terakreditasi dan 9 MA yang akan kadaluarsa tahun depan untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat kedelapan Propinsi Sumatera Selatan 183 MA (5.9% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama, 70% (128 MA) sudah memenuhi standar, sekarang baru 56.4% (84 MA) sehingga perlu mendorong minimal 44 MA yang belum terakreditasi, dan 1 MA yang akan kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua dimana 50 % (92 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B, sekarang baru 34.5 % (63 MA), sehingga harus mendorong minimal 24 MA yang belum terakreditasi dan 1 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat kesembilan Propinsi Jambi 181 MA (5.8 % dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama dimana 70% (127 MA) sudah memenuhi standar, sekarang baru 38.8% (70 MA) sehingga perlu mendorong minimal 57 MA yang belum terakreditasi, dan 1 MA yang akan kadaluarsa untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua dimana 50 % (91 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B, sekarang baru 13.9 % (25 MA), sehingga harus mendorong minimal 99 MA yang belum terakreditasi untuk melakukan akreditasi.

Posisi terpadat kesepuluh Propinsi DKI Jakarta 90 MA (2.9% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70 % (63 MA) sudah memenuhi standar, sekarang sudah melampaui 90.1 % (81 MA). Namun, akan lebih baik lagi bila mendorong 9 MA yang belum terakreditasi untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50 % (45 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B, sekarang sudah 84.5% (76 MA), sehingga akan lebih baik lagi bila mendorong 9 MA yang belum terakreditasi untuk segera melakukan akreditasi.

Posisi terpadat kesebelas Propinsi Bengkulu 45 MA (1.5% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70% (32 MA) sudah memenuhi standar, sekarang baru 59.2% (28 MA) sehingga perlu mendorong minimal 4 MA yang belum terakreditasi dan 3 MA yang akan kadaluarsa mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50% (23 MA) terakreditasi minimal peringkat B. Sekarang baru 32.5% (16 MA), sehingga harus mendorong minimal 7 MA yang belum terakreditasi dan 2 MA yang akan kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi.

Posisi terpadat kedua belas Propinsi Kepulauan Riau 27 MA (0.9% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama dimana 70 % (19 MA) sudah memenuhi standar, sekarang sudah 85.2 % (23 MA) terpenuhi, namun masih perlu mendorong 8 MA yang akan kadaluarsa untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50% (14 MA) terakreditasi minimal peringkat B, sekarang sudah 63 % (17 MA) melampaui target. Namun, harus segera mendorong 8 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.

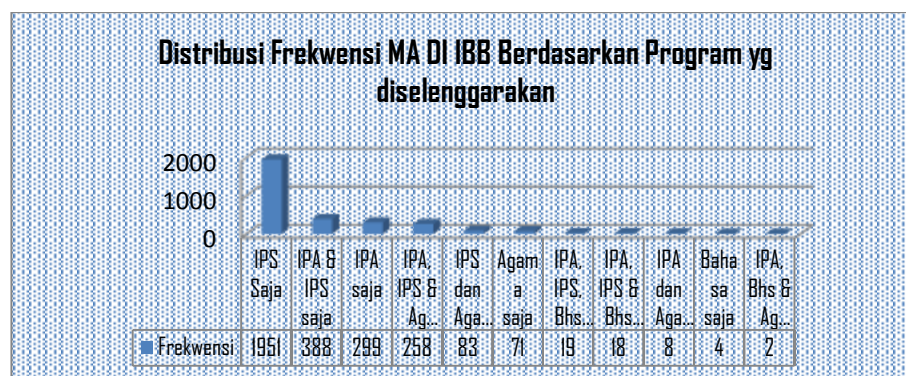
Posisi terpadat ketigabelas Propinsi Bangka Belitung 21 MA (0.7% dari 3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70 % (15 MA) sudah memenuhi standar, sekarang sudah 70.0% (15 MA) sudah memenuhi target, namun masih perlu mendorong minimal 2 MA yang belum terakreditasi atau 2 MA yang masa berlaku akreditasinya akan berakhir untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50% (11 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang sudah 70 % (15 MA) melebihi target, terlebih lagi kalau 3 MA yang belum diakreditasi dan 2 MA akan kadaluarsa untuk segera diakreditasi.

Peta Mutu MA IBB Berdasarkan Hasil Akreditasi Sampai Oktober 2013 dan Program yang Disesenggarakan

Program yang dapat diselenggarakan oleh masing-masing Madrasah Aliyah, sebagaimana yang secara eksplisit tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional, terbatas pada 3 macam (IPA, IPS, dan Bahasa) sebagaimana di SMA. Namun, pada tahun 2004/2005 ditambah dengan Program Keagamaan dan baru mulai diselenggarakan Ujian Nasional pada tahun 2007/2008, ini dilatarbelakangi posisinya dan keterbatasan mobilitas lulusannya untuk meneruskan pendidikan lanjutannya atau memasuki dunia kerja. Bahkan pihak Kementerian Agama terkesan cenderung menyerahkannya pada pihak swasta. Baru masa reformasi akhir-akhir ini mencoba menghidupkannya kembali.

Gambar 5



Lebih separoh (1952/62.9%) dari MA di IBB (3101) hanya menyelenggarakan Program IPS saja terdiri atas: 2(0.1) MAN dan 1950 (99.9%) MA Swasta. Diantaranya: 54% (1.074) MA yang sudah memenuhi standar, sehingga untuk mencapai target sasaran pembangunan pertama 70% (1366 MA) sudah memenuhi standar, masih perlu mendorong dan melayani secara khusus minimal 292 MA yang sudah kadaluarsa untuk mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan yang kedua 50% (976 MA) terakreditasi minimal peringkat B, baru dicapai oleh 631/31.3% MA, sehingga masih perlu mendorong minimal 345 MA yang sudah kadaluarsa untuk mengikuti program akreditasi.

Ranking kedua: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPA dan IPS saja, 389 MA (12.5 % dari 3101 MA di IBB) terdiri atas 21(5.4%) MANegeri dan (368/94.6%) MA Swasta, diantaranya 316 MA (81.2%) sudah memenuhi standar, berarti sasaran pembangunan pertama (70%/272 MA) sudah terlampaui. Begitu juga dengan target yang kedua, (50%/195 MA) terakreditasi minimal

peringkat B juga sudah dilampaui oleh 286 MA (68.9%). Namun, akan lebih baik lagi kalau 68 MA yang sudah kadaluarsa didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking ketiga: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPA saja, 299 MA (9.6% dari 3101 MA di IBB) terdiri atas 10 (3.3%) MA Negeri dan 289 (96.7%) MA Swasta, diantaranya 205 (68.5%) MA sudah memenuhi standar, berarti sasaran pembangunan pertama (70%/209 MA) sudah hampir tercapai. Bahkan untuk target sasaran pembangunan kedua, 50% (150) MA sudah terakreditasi minimal peringkat B sudah dicapai oleh 152 MA (50.8 %). Namun, akan lebih baik lagi kalau 87 MA yang sudah kadaluarsa atau belum terakreditasi didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik, sehingga kualitasnya jauh diatas target.

Ranking keempat: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPA, IPS dan Agama saja 259 MA (8.4% dari 3101 MA di IBB), didominasi oleh MA Negeri 239 (92.3%) dan hanya 20 (7.7%) MA Swasta, diantaranya 209 (80.5%) MA sudah memenuhi standar, berarti sasaran pembangunan pertama 70% (181) MA sudah terlampaui. Bahkan target sasaran pembangunan yang kedua, (50%/130 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B sudah dicapai oleh 200 MA (77.2 %), yang berarti sudah jauh melampaui target. Namun, akan lebih baik lagi kalau 48 MA yang sudah kadaluarsa dan 2 MAN di Sumbar yang tidak memenuhi standar didorong - dilayani secara khusus untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking kelima: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPS dan Agama saja, sebanyak 81 (2.6%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, didominasi oleh MA Negeri (62/76.5%) dan hanya (19/23.5%) MA Swasta, diantaranya 64 (78.9 %) MA sudah memenuhi standar, sehinggasasaran pembangunan pertama 57 (70%) MA sudah terlampaui, bahkan untuk target sasaran pembangunan yang kedua, (50%/41 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B juga sudah terlampaui oleh (66.6%/54) MA. Namun, akan lebih baik lagi kalau 16 MA yang sudah kadaluarsa didorong dan dilayani secara khusus untuk mengikuti akreditasi.

Ranking keenam: MA yang hanya menyelenggarakan Program Agama saja, sebanyak 71 (2.3%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, didominasi oleh MA Swasta 51 (71.8%) dan hanya 20 (28.2%) MANegeri, diantaranya 46 MA (64.8%) yang

sudah memenuhi standar yang berarti sasaran pembangunan pertama 70% (50) MA sudah hampir terpenuhi, bahkan untuk target sasaran kedua, 50% (36) MA terakreditasi minimal pada peringkat B. Justru sudah dicapai oleh 54.9%(39) MA. Namun, akan lebih baik lagi kalau 22 MA yang sudah kadaluarsa dan 3 MA yang tidak memenuhi standar didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking ketujuh: MA yang menyelenggarakan keempat program (IPA, IPS, Bahasa dan Agama) 19 MA (0.6%) dari seluruh (3101) MA di IBB, didominasi oleh MA Negeri (15/78.9%) dan hanya 4(21.1%) MASwasta, diantaranya 14 (73.7%) MA yang sudah memenuhi standar,berarti sasaran pembangunan pertama 70% (13) MA sudah memenuhi target sasaran, bahkan untuk target sasaran pembangunan yang kedua, 50% (10) MA terakreditasi minimal peringkat B juga sudah terlampaui (14/73.7% MA). Namun, akan lebih baik lagi kalau 5 MA yang sudah kadaluarsa didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking kedelapan: MA yang menyelenggarakan Program IPA, IPS, dan Bahasa saja, 18 (0.6%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, didominasi oleh MA Negeri (15/83.3%) dan hanya 3 (16.7%) MA Swasta, diantaranya 9 (50%) MA sudah memenuhi standar, berarti sasaran pembangunan pertama 70% (13) MA sudah hampir terpenuhi. Begitu juga dengan sasaran kedua, 50% (9) MA terakreditasi minimal peringkat B baru 8 (44.4%) MA, sehingga untuk memenuhi target perlu mendorong 9 MA yang kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking kesembilan: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPA dan Agama saja, sebanyak 8 (0.8%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, semuanya Swasta, diantaranya; 3 (37.5%) MA yang sudah memenuhi standar, sementara 5 MA lainnya sudah kadaluarsa. Untuk memenuhi target sasaran pembangunan agar segera mendorong 5 MA yang sudah kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi.

Ranking kesepuluh: MA yang menyelenggarakan Program Bahasa saja, 4 (0.1%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, semuanya Swasta, 3 MA di Pandeglang Banten; 1) MA Darul Iman Kd Pandak telah diakreditasi tanggal 09 November 2011 peringkat B (83.75); 2) MA Daar El Hijrah Wal Banna dan 3) MA Anwarul Hidayah belum terakreditasi; dan 4) MAS As Salam Tebo Jambi telah diakreditasi

tanggal 11 Oktober 2011 peringkat B (74.32). Baru 2 MA (50%) yang memenuhi standar, berarti baru mencapai target pembangunan kedua. Untuk mencapai target pertama perlu mendorong secara khusus 2 MA yang belum diakreditasi untuk mengikuti akreditasi secara baik.

Ranking kesebelas: MA yang menyelenggarakan Program IPA, Bahasa dan Agama saja 2 MA (0.1 % dari 3101 MA di IBB) semuanya Swasta 1 di Aceh dan 1 di Jawa Barat dan sudah kadaluarsa. Untuk memenuhi target sasaran pembangunan agar mendorong dan melayani kedua MA tersebut secara khusus, maka mengikuti akreditasi secara baik (Diolah dari <http://www.ban-sm.or.id>/diunduh tgl 10 Oktober 2015).

Problematika MA IBB Dalam Akreditasi Sampai Oktober 2013

Berdasarkan wawancara dengan sebagian Kepala Madrasah di DKI dan Kota Tasikmalaya, pelaksanaan akreditasi MA, baik swasta maupun negeri, selama ini kesulitan yang mendasar adalah menyangkut sarana prasarana laboratorium, dan alat/bahan praktek belum terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah. Sehingga upaya penyediaan ruang khusus laboratorium fisika, kimia, dan biologi secara menyendiri baru sebatas tatkala mau acara visitasi dalam rangka akreditasi. Selain itu ruang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk ruang kelas. Begitu juga dengan alat-alat prakteknya akan lengkap bila ada program visitasi, semua direkayasa demi dapat peringkat terbaik. Kondisi demikian, sangat tidak mendukung pendidikan karakter yang dibangun, bahkan tidak jarang melibatkan secara langsung peserta didik dalam mempersiapkannya.

Di sisi lain, pihak Kementerian Agama memberikan bantuan umumnya hanya alat-alat laboratoriumnya saja, sementara ruangan diserahkan kepada madrasah termasuk yang berstatus negeri. Di samping itu, paket bantuannya pun tidak dipisah justru dijadikan laboratorium IPA. Untuk program IPS bentuk demikian itu masih dapat dipahami, tetapi tidak untuk Program IPA.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari temuan penelitian di atas, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah MA di IBB 3.101 hampir setengah (46.53%) dari jumlah (6.664) MA se Indonesia telah memenuhi standar sebanyak 63%, bahkan 44% nya pada peringkat B & A. sudah mendekati sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014
2. MA Negeri sebanyak 383 lebih dari setengah MAN se Indonesia, 79% sudah memenuhi standar nasional pendidikan, bahkan 73%-nya pada peringkat A & B sudah melampaui sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014. Sementara MA Swasta sebanyak 2.718 hampir setengah dari MAS se Indonesia, baru 60%-nya yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan dan baru 40 % pada peringkat B & A. Sehingga sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014 masih kurang 10% lagi.
3. MA tersebar di 13 Propinsi, baru MA di 5 Propinsi (Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) yang sudah memenuhi target sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014. Sedangkan di 8 Propinsi lainnya masih perlu pelayanan dan dorongan secara khusus pada tahun 2014 sehingga sasaran tercapai.
4. Dari 4 macam program yang dapat diselenggarakan di MA, hanya 19 /0.6% MA yang menyelenggarakan semua program telah memenuhi standar nasional pendidikan bersama dengan 4 kelompok MA yang menyelenggarakan IPA & IPS saja 389 MA; IPA saja 299 MA; IPA, IPS dan Agama saja 259 MA; dan IPS dan Agama saja 81 MA; Sementara 6 kelompok MA lainnya (MA yang menyelenggarakan; IPS saja 1952 MA; Agama saja 71 MA, Bahasa saja 4 MA, IPA, IPS dan Bahasa saja 18 MA; IPA dan Agama saja 8 MA; dan IPA, Bahasa dan Agama saja 2 MA. Sehingga belum memenuhi target pembangunan.

5. Problematika yang dihadapi MA yang mendasar dalam akreditasi ini adalah keberadaan bermacam laboratorium, sehingga dalam rangka visitasi Team Asesor pihak MA banyak melakukan rekayasa yang tidak semestinya.

Saran

Untuk meningkatkan mutu MA dan mencapai target pembangunan Kementerian Agama tahun 2014, disarankan ke direktorat terkait sebagai berikut:

1. Perlu dorongan khususnya kepada MA Swasta yang sudah kadaluarsa, 3 MAN yang tidak memenuhi standar; dan MA yang hanya menyelenggarakan program IPS saja untuk segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga kepada jajaran pelayanan pembinaan madrasah di 8 Kementerian Agama provinsi Banten, Lampung, Riau, Aceh, Sumbar, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu untuk mengambil langkah percepatan dalam akreditasi MA.
2. Perlu perencanaan dan bantuan secara lengkap dan tepat keberadaan Laboratorium dengan segala macam dan kelengkapannya di MA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2012. Laporan dan Statistik hasil Akreditasi tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan. 2012. <http://www.ban-sm.or.id/>

Denzin, Norman K, Yvonna S. Lincoln (Eds). 1994.*Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications

Pusat Penilaian Pendidikan. 2013. "Laporan Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013." Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan dan Perundang-undangan

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional.

Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 tentang perangkat akreditasi untuk SMA/MA.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.